

ANALISIS TENTANG TANTANGAN INFORMAL TERHADAP PERATURAN PELABELAN NUTRISI DI WORLD TRADE ORGANIZATION

Hartana, Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com, bagus.prema@undiksha.ac.id

Abstrak

Pola makan yang buruk dan malnutrisi merupakan kontributor utama beban penyakit global. Pada 2017, 10–12 juta kematian disebabkan oleh faktor risiko makanan, termasuk konsumsi garam, gula, dan lemak trans berlebih. Penderitaan manusia yang disebabkan oleh penyakit ini sangat akut di negara berpenghasilan rendah dan menengah di mana kekurangan gizi yang tinggi terjadi bersamaan dengan meningkatnya tingkat kelebihan gizi, obesitas, dan penyakit tidak menular terkait. Misalnya, para sarjana telah mengidentifikasi bagaimana tindakan pemerintah untuk mengatasi penyakit gizi dirusak oleh retorika neoliberal melalui tuntutan kebebasan individu, tanggung jawab pribadi untuk kesehatan, dan regulasi minimal untuk mempertahankan daya saing ekonomi. Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Studi eksperimental telah secara konsisten menunjukkan 'efek pembingkai' pada sikap dan prioritas politik, seperti ketika orang menolak proposal kebijakan ketika disajikan dengan efek negatifnya dan mendukungnya ketika disajikan dengan efek positif yang setara. Penelitian juga menunjukkan bahwa argumen yang memunculkan seruan normatif dan ideologis bisa sangat persuasif. Daya tarik diskursif ini menempati peringkat di antara alat paling berpengaruh yang dapat dimanfaatkan oleh para aktor untuk membentuk keputusan dan agenda kebijakan.

Kata Kunci : Gizi, Norma Hukum, Penyakit Global, Penderitaan Manusia

Abstract

Poor diet and malnutrition are major contributors to the global burden of disease. In 2017, 10–12 million deaths were caused by dietary risk factors, including excess consumption of salt, sugar and trans fats. The human suffering caused by these diseases is especially acute in low- and middle-income countries where high malnutrition coexists with increasing rates of overnutrition, obesity, and related non-communicable diseases. For example, scholars have identified how government actions to tackle disease nutrition is undermined by neoliberal rhetoric through demands for individual freedom, personal responsibility for health, and minimal regulation to maintain economic competitiveness. The type of writing used in writing this research is the normative legal research method. The normative legal research method is a method that examines law from an internal perspective with the object of research being legal norms. Experimental studies have consistently demonstrated a 'framing effect' on political attitudes and priorities, such as when people reject a policy proposal when presented with its negative effect and support it when presented with an equivalent positive effect.

Research also shows that arguments that evoke normative and ideological appeals can be very persuasive. This discursive appeal ranks among the most influential tools actors can leverage to shape policy decisions and agendas.

Keywords : *Nutrition, Legal Norms, Global Diseases, Human Suffering*

PENDAHULUAN

Pola makan yang buruk dan malnutrisi merupakan kontributor utama beban penyakit global (Lim et al., 2012). Pada 2017, 10–12 juta kematian disebabkan oleh faktor risiko makanan, termasuk konsumsi garam, gula, dan lemak trans berlebih (Afshin et al., 2019). Penderitaan manusia yang disebabkan oleh penyakit ini sangat akut di negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs) di mana kekurangan gizi yang tinggi terjadi bersamaan dengan meningkatnya tingkat kelebihan gizi, obesitas, dan penyakit tidak menular terkait (NCD).

(Perez-Escamilla et al., 2018). Penyakit-penyakit ini juga mahal untuk diobati dan, seperti halnya kemiskinan dapat meningkatkan risiko gizi buruk, harus dibayar pengobatan mendorong jutaan rumah tangga ke dalam kemiskinan setiap tahunnya (Jan et al., 2018; Mahal et al. 2010). Namun, skala tantangan terhadap kesehatan dan kemakmuran global yang ditimbulkan oleh penyakit terkait pola makan sama sekali tidak dapat dihindari, karena serangkaian tindakan dapat efektif dalam mencegahnya (WHO 2017). Banyak yang membutuhkan peran kuat pemerintah melalui undang-undang dan peraturan yang menargetkan pendorong struktural gizi buruk, termasuk lingkungan makanan tidak sehat yang ditandai dengan banyaknya makanan murah dan tidak sehat (Swinburn et al., 2011). Ada pengakuan internasional yang semakin besar akan perlunya menerapkan langkah-langkah tersebut (PBB 2018). Namun, tindakan pemerintah hingga saat ini masih lamban, tidak memadai, dan tidak merata, terutama di LMICs (WHO 2020). Memang, ahli gizi sering mengamati bahwa menerapkan intervensi struktural untuk mengatasi lingkungan makanan yang tidak sehat penuh dengan tantangan politik (Baker et al., 2018). Dengan demikian, para sarjana semakin memperhatikan proses politik dan dinamika kekuasaan yang membentuk implementasi kebijakan gizi. Misalnya, para sarjana telah mengidentifikasi bagaimana tindakan pemerintah untuk mengatasi penyakit gizi dirusak oleh retorika neoliberal melalui tuntutan kebebasan individu, tanggung jawab pribadi untuk kesehatan, dan regulasi minimal untuk mempertahankan daya saing ekonomi.¹

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang dikaitkan dengan suatu pendekatan (sistematis) untuk mempelajari suatu subjek atau sasaran penelitian guna menemukan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mengandung validitasnya. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang metodis, sistematis, dan konsisten yang melibatkan analisis dan konstruksi, Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah pengumpulan data dengan tujuan mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan informasi, teori, dan pemahaman, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam keberadaan manusia (Wijayanti, 2022 : 33). Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Penelitian hukum disamping itu juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan

¹ Avni, Shlomit, Filc, Dani, Davidovitch, Nadav, 2015. "Asosiasi medis Israel wacana tentang ketidakadilan kesehatan. Soc. Sains. Kedokteran 144, 119–126.

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Ali, 2021).

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (Muhaimin, 2020 : 47). Jenis penelitian ini menitikberatkan pada kajian serta analisis terhadap adanya norma konflik terkait.

Apa yang banyak disadari oleh penelitian ini adalah bahwa bingkai, narasi, dan daya tarik ideologis yang ditampilkan dalam wacana politik dapat berdampak kuat pada apakah dan bagaimana campur tangan pemerintah (Avni et al.

2015). Pengaruh diskursif terhadap kebijakan ini biasanya kurang terlihat dibandingkan faktor-faktor lain, seperti bukti mengenai manfaat atau biaya suatu kebijakan, tetapi ketidakjelasan memungkirkan ketidakkonsekuenan. Studi eksperimental telah secara konsisten menunjukkan 'efek pembingkai' pada sikap dan prioritas politik, seperti ketika orang menolak proposal kebijakan ketika disajikan dengan efek negatifnya (misalnya peraturan menyebabkan peningkatan pengangguran sebesar 5%) dan mendukungnya ketika disajikan dengan efek positif yang setara (misalnya peraturan menopang 95% pekerjaan) (Chong dan Druckman 2007). Penelitian juga menunjukkan bahwa argumen yang memunculkan seruan normatif dan ideologis bisa sangat persuasif (Feinberg dan Willer 2015; Kidwell et al. 2013). Daya tarik diskursif ini menempati peringkat di antara alat paling berpengaruh yang dapat dimanfaatkan oleh para aktor untuk membentuk keputusan dan agenda kebijakan (Schmidt 2010). Untuk memahami proses politik dan dinamika kekuasaan yang membentuk kebijakan gizi, penting untuk menilai bagaimana intervensi dijelaskan dan diperebutkan dalam forum yang berbeda, dan bagaimana berbagai sumber kekuasaan dimobilisasi dalam artikel ini.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bisa dibilang merupakan salah satu forum paling penting yang kurang dipelajari di mana berbagai kebijakan, termasuk peraturan gizi, telah dibahas dalam beberapa dekade terakhir (Barlow et al., 2018; Thow et al., 2017). WTO adalah organisasi antar pemerintah atau organisasi yang mengoordinasikan aturan perdagangan antara 164 anggotanya (WTO 2020). Selain mengurangi pajak perdagangan ('tarif'), anggota WTO setuju untuk mengikuti aturan yang terkait dengan tindakan non-tarif (yang mencakup 'hambatan teknis perdagangan').² Ini karena biaya perdagangan dapat diciptakan oleh perbedaan peraturan antar negara bagian, seperti peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan lingkungan makanan yang sehat. Misalnya, WHO merekomendasikan pelabelan nutrisi pada makanan kemasan (WHO 2013). Ini memberikan informasi nutrisi sekilas tentang makanan di tempat penjualan (Jones et al., 2019). Namun, pelabelan nutrisi dapat menimbulkan biaya perdagangan non-tarif jika produsen harus mematuhi persyaratan yang berbeda di yurisdiksi yang berbeda (Thow et al., 2017). Oleh karena itu, pelabelan nutrisi berada di bawah kewenangan Perjanjian WTO tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan, 'Perjanjian TBT' (WTO 2015).

² Nike, 2012. Memahami promosi kesehatan dalam iklim neoliberal dan pembuatannya warga negara yang sadar kesehatan. *Kritik. Pub. Kesehatan* 22 (1), 99–105.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi neoliberal: individualisasi penyebab gizi buruk

Anggota WTO menentang keputusan untuk menerapkan kebijakan pelabelan nutrisi dan fitur desain mereka dengan memajukan narasi neoliberal yang memperjuangkan faktor penentu individu dari gizi buruk sambil meremehkan peran produk makanan dan profil nutrisi tidak sehat dari makanan kemasan. Ada lima argumen utama yang digunakan untuk membangun narasi ini. Argumen tersebut dikutip bersama dan untuk mendukung argumen teknis yang mengutip aturan TBT, termasuk yang mengklaim bahwa tindakan tersebut menimbulkan biaya perdagangan yang 'tidak perlu' dan yang mempertanyakan dasar pemikiran atau legitimasi tindakan tersebut, seringkali dengan mengacu pada kekhawatiran tentang basis bukti yang mendukung ukuran.

Pertama, anggota menyoroti peran yang dimainkan individu dan kebiasaan atau gaya hidup mereka dalam menyebabkan penyakit diet. Misalnya, perwakilan Brasil mengomentari proposal pelabelan Chili dengan menyatakan hal itu obesitas disebabkan oleh “gaya hidup dan kebiasaan buruk” (G/TBT/M/62).

Kedua, anggota WTO menyoroti peran konteks pola makan individu dalam menentukan hubungan antara konsumsi makanan olahan dan penyakit. Salah satu contoh pembingkaiannya terjadi ketika seorang pejabat dari AS berpendapat bahwa proposal pelabelan Peru “gagal mempertimbangkan total asupan makanan atau jumlah dan frekuensi konsumsi makanan” (G/TBT/M/73). Seorang perwakilan dari Kosta Rika juga berpendapat bahwa peraturan pelabelan yang diusulkan Uruguay menyesatkan dan membingungkan karena gagal memperhitungkan bagaimana “konteks diet secara keseluruhan itu apa yang benar-benar penting dalam menginformasikan dan mengedukasi konsumen tentang nutrisi yang menjadi perhatian kesehatan masyarakat” (G/TBT/W/613).

Ketiga, anggota WTO meremehkan risiko makanan dan bahan olahan dengan mempertanyakan bahayanya, sambil menyiratkan bahwa pengaturan atau moderasi diri individu relatif penting. Misalnya, pada tahun 2013 seorang pejabat AS menantang peraturan pelabelan yang diusulkan Peru dengan menyatakan bahwa tidak pantas menggunakan pesan yang memperingatkan individu tentang produk 'tinggi' nutrisi tertentu karena "makanan apa pun dapat dimakan dalam jumlah sedang sebagai bagian dari diet sehat secara keseluruhan" (G/TBT/M/61).

Keempat, anggota WTO juga menyarankan agar proposal pelabelan secara keliru memilih makanan sebagai penyebab penyakit gizi. Misalnya, komentar tertulis Mexico tentang rancangan undang-undang Chili menyatakan bahwa menggunakan istilah 'buruk' pada label dapat mengarahkan konsumen untuk “menganggap bahwa non-penyakit menular seperti obesitas disebabkan oleh konsumsi makanan tertentu” (G/TBT/W/429). Perwakilan Guatemala juga mempertanyakan proposal pelabelan Ekuador dengan menyatakan bahwa hal itu “mengutamakan makanan sebagai satu- satunya penyebab masalah” (G/TBT/M/66).

Terakhir, para anggota menekankan manfaat nutrisi dari makanan yang telah ditetapkan sebagai 'tidak sehat' menurut skema pelabelan nutrisi. Misalnya, pada tahun 2007 seorang pejabat AS secara tidak resmi menentang skema pelabelan lampu lalu lintas yang diusulkan Thailand dengan menyatakan bahwa “dia khawatir bahwa makanan dalam daftar tersebut akan dicap buruk padahal makanan ini dapat menjadi bagian dari diet sehat” (G/TBT/M/45). Seorang pejabat AS juga menentang skema pelabelan yang diusulkan Indonesia pada tahun 2013 dengan menyatakan bahwa “gula, natrium dan lemak ... juga merupakan komponen penting dari diet sehat” (G/TBT/M/60).³

³ Babb, Sarah L., Alexander, E Kentikelenis, 2017. Lembaga keuangan internasional sebagai agen neoliberalisme. Dalam: Dalam Buku Pegangan SAGE tentang Neoliberalisme. Publikasi SAGE , Thousand Oaks.

Menggugat dan menegaskan kesesuaian dengan teori, nilai, dan keyakinan ekonomi neoliberal

Artikel anggota WTO tentang proposal pelabelan nutrisi menampilkan pernyataan yang menegaskan atau menentang legitimasi normatif kebijakan anggota berdasarkan kesesuaiannya dengan teori, nilai, dan keyakinan ekonomi neoliberal. Ada tiga pernyataan seperti itu. Pertama, anggota WTO menyetujui apa yang mereka lihat sebagai prinsip luas yang tercermin dalam kebijakan pelabelan nutrisi: pendekatan individual untuk memperbaiki pola makan yang buruk dengan menargetkan peningkatan informasi konsumen dan memperbaiki pilihan, gaya hidup, dan kebiasaan. Misalnya, pada tahun 2007 seorang pejabat Uni Eropa menyatakan dukungan untuk tujuan pemerintah Thailand “meningkatkan informasi konsumen tentang fakta gizi” (G/TBT/M/42). Seorang pejabat Kosta Rika selanjutnya mengomentari proposal Uruguay dengan menyatakan bahwa mereka “mendukung semua program pelatihan, pendidikan dan informasi yang ditujukan untuk memperbaiki kebiasaan makan penduduk” (G/TBT/M/ 64). Dalam kedua kasus tersebut, para anggota WTO ini kemudian mengkritik ruang lingkup dan rancangan langkah-langkah yang diusulkan.

Kedua, anggota WTO mengutip kerugian, inefisiensi, dan ketidakadilan intervensi negara. Salah satu manifestasi dari argumen ini mengutip kemungkinan konsekuensi negatif dari intervensi negara untuk nutrisi dan kesehatan, yang mencerminkan keyakinan neoliberal bahwa intervensi negara adalah pendekatan yang berbahaya dan tidak efisien untuk mencapai tujuan sosial. Misalnya, seorang perwakilan Kosta Rika secara informal menentang proposal pelabelan Peru dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut berisiko “berkontribusi besar pada peningkatan pasokan informal produk makanan dan minuman yang tidak diproduksi di bawah standar kesehatan yang diketahui” (G/TBT/M/66). Para anggota selanjutnya berkomentar tentang ketidakadilan intervensi negara, yang mencerminkan keyakinan neoliberal bahwa intervensi negara itu jahat. Pada tahun 2013, seorang perwakilan AS berpendapat bahwa peraturan yang diusulkan Indonesia akan “memposisikan makanan tertentu secara tidak adil di mata konsumen” (G/TBT/M/ 60). Yang lain menyatakan bahwa kebijakan "berprasangka", seperti yang dinyatakan di atas dalam komentar Guatemala tentang proposal Ekuador, atau bahwa menandai bahan-bahan tertentu tingkat tinggi "menjelekkan" atau "menstigmatisasi" produk tertentu, seperti yang diperdebatkan oleh AS dalam komentar mereka tentang nutrisi Thailand dan Chili pelabelan proposal kebijakan (G/TBT/M/45; G/TBT/M/61).⁴

Dalam studi ini kami mengidentifikasi bahwa wacana Komite TBT tentang kebijakan pelabelan nutrisi FOP interpretatif yang diusulkan oleh Thailand, Chili, Indonesia, Peru, Ekuador, Bolivia, dan Uruguay, 2007–2019, menampilkan serangkaian kerangka non- teknis, narasi, dan normatif. klaim. Anggota WTO memobilisasi asumsi dan keyakinan neoliberal untuk memperjuangkan pendapat individual tentang penyebab gizi buruk, kebijakan sanksi yang berakar pada perubahan tingkat individu, dan menentang inefisiensi, kerugian, dan ketidakadilan dari peraturan yang diusulkan anggota. Pola wacana ini konsisten di seluruh HIC dan LMIC. Anggota WTO HIC juga membingkai ulang tujuan kebijakan anggota LMIC untuk fokus pada faktor penentu individu gizi buruk dan intervensi berorientasi pasar, sekali lagi mengacu pada asumsi neoliberal melalui pernyataan ini. Anggota HIC WTO selanjutnya menekan negara-negara lain untuk mengadopsi desain dan proses kebijakan yang selaras dengan yang telah mereka adopsi atau sukai.

Apa implikasi pola wacana di WTO ini bagi pemahaman kita tentang proses politik yang membentuk atau menumbangkan kebijakan pelabelan nutrisi, dan sumber kekuasaan

⁴ Atkinson, Rob, 2000. “Narasi kebijakan: konstruksi masalah perkotaan dan kebijakan perkotaan dalam wacana resmi pemerintah Inggris 1968–1998. *Kritik. Soc. Pol.* 20 (2), 211–232.

yang dimobilisasi dalam proses ini? Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa bingkai, narasi, dan seruan normatif dapat memiliki pengaruh kuat pada agenda, prioritas, dan keputusan politik, terutama jika bingkai, narasi, dan daya tarik normatif seperti neoliberalisme, dan diangkat oleh aktor yang kuat secara ekonomi (Carstensen dan Schmidt 2016; Chong dan Druckman 2007; Kidwell et al. 2013). Kami mengidentifikasi serangkaian seruan yang mengundang ideologi neoliberal untuk menggugat proposal pelabelan nutrisi di WTO.

Anggota berpenghasilan tinggi juga menggunakan klaim non-teknis tertentu untuk melobi tujuan dan desain kebijakan yang mereka sukai. Oleh karena itu wacana TBT dapat berfungsi sebagai alat yang tidak mencolok di mana kebijakan pelabelan nutrisi di LMICs dibentuk, dilemahkan, atau berpotensi ditumbangkan oleh kekuatan yang kuat. anggota WTO berpenghasilan tinggi, dan oleh ideologi neoliberal yang kuat.

Prinsip-prinsip neoliberal telah memenuhi ruang kebijakan secara lebih luas dan artikel TBT ini mungkin hanya mencerminkan kenyataan ini. Namun, artikel TBT dapat berfungsi untuk lebih menormalkan dan melegitimasi retorika dan pendekatan kebijakan neoliberal anggota. Selain itu, hampir setiap negara secara global sekarang menjadi anggota WTO, dan mereka yang mengamati kekhawatiran yang diangkat terkait tindakan anggota lain

di Komite TBT kemungkinan besar akan mempertimbangkan komentar tersebut saat merancang kebijakan mereka sendiri. Wacana neoliberal tentang sifat yang ditampilkan dalam artikel TBT berfungsi lebih luas untuk mendesosialisasikan penyebab gizi buruk dan mendepolitisasi masalah kesehatan yang ditimbulkannya, karena pola makan yang buruk menjadi masalah pribadi yang diharapkan oleh individu, bukan pemerintah. alamat (Carter 2015; Chaufan dan Saliba 2019; Manis 2018). Oleh karena itu, wacana TBT dapat berpengaruh dalam mencegah anggota mengusulkan intervensi struktural dan sebagai alternatif mendorong mereka untuk fokus pada faktor penentu pola makan buruk pada tingkat individu, dan/atau untuk memprioritaskan kebijakan yang memerlukan peraturan negara wajib yang relatif kecil.

Kemungkinan ini didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa klaim yang diajukan di Komite TBT sebelumnya dikaitkan dengan perubahan kebijakan, termasuk ruang lingkup tindakan yang sedang dipertimbangkan (Barlow et al., 2018; Wijkstrom dan McDaniels 2013).

PENUTUP

Kesimpulan

Prinsip-prinsip neoliberal telah memenuhi ruang kebijakan secara lebih luas dan artikel TBT ini mungkin hanya mencerminkan kenyataan ini. Namun, artikel TBT dapat berfungsi untuk lebih menormalkan dan melegitimasi retorika dan pendekatan kebijakan neoliberal anggota. Selain itu, hampir setiap negara secara global sekarang menjadi anggota WTO, dan mereka yang mengamati kekhawatiran yang diangkat terkait tindakan anggota lain

di Komite TBT kemungkinan besar akan mempertimbangkan komentar tersebut saat merancang kebijakan mereka sendiri. Wacana neoliberal tentang sifat yang ditampilkan dalam artikel TBT berfungsi lebih luas untuk mendesosialisasikan penyebab gizi buruk dan mendepolitisasi masalah kesehatan yang ditimbulkannya, karena pola makan yang buruk menjadi masalah pribadi yang diharapkan oleh individu, bukan pemerintah. alamat (Carter 2015; Chaufan dan Saliba 2019; Manis 2018). Oleh karena itu, wacana TBT dapat berpengaruh dalam mencegah anggota mengusulkan intervensi struktural dan sebagai alternatif mendorong mereka untuk fokus pada faktor penentu pola makan buruk pada tingkat individu, dan/atau untuk memprioritaskan kebijakan yang memerlukan peraturan negara wajib yang relatif kecil.

Kemungkinan ini didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa klaim yang diajukan di Komite TBT sebelumnya dikaitkan dengan perubahan kebijakan, termasuk ruang lingkup tindakan yang sedang dipertimbangkan (Barlow et al., 2018; Wijkstrom dan McDaniels 2013).

Yang pasti, klaim non-teknis yang kami identifikasi menyertai seruan teknis-hukum pada aturan TBT, dan aturan TBT dapat membentuk ruang lingkup dan konten wacana non-

teknis. Sebagai contoh, Anggota dapat menentang konsistensi usulan pelabelan anggota dengan teori ekonomi neoliberal (seperti yang kami ilustrasikan) karena mereka menganggap argumen tersebut konsisten dengan 'semangat' aturan WTO: untuk mengurangi biaya perdagangan, mempromosikan perdagangan dan, pada akhirnya, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, seperti yang dicatat Lencucha dalam analisis mereka tentang perselisihan WTO tentang tembakau, anggota WTO dapat membuat klaim non-teknis untuk mencoba dan memperkuat argumen teknis-hukum mereka dan untuk memberi makna, yaitu, untuk membuatnya beresonansi (Lencucha et al. .2016). Dengan demikian, argumen non-teknis dapat membantu membuat argumen teknis mengenai kebijakan nutrisi menjadi persuasif. Poin-poin ini menggarisbawahi pentingnya argumen non-teknis untuk memahami bagaimana proses WTO membentuk kebijakan pelabelan nutrisi.

Saran

Artikel ini memberikan wawasan bagi komunitas kesehatan masyarakat mengenai tanggapan terhadap tantangan perdagangan informal. Biasanya ada dua kesimpulan kebijakan yang muncul dari studi yang menilai bagaimana peraturan TBT digunakan untuk menggugat kebijakan nutrisi: peraturan harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kewajiban teknis yang disyaratkan dalam Perjanjian TBT untuk mengurangi kemungkinan tantangan informal, dan peraturan TBT dan kewajiban perdagangan lainnya harus ditegakkan dan dirancang dengan cara yang memberikan ruang yang memadai untuk implementasi kebijakan nutrisi yang efektif.

Namun, dengan mengungkap klaim non-teknis yang diajukan untuk secara informal menantang kebijakan pelabelan nutrisi di Komite TBT, penelitian kami menyoroti bahwa perbaikan teknis terhadap rezim perdagangan global atau rancangan kebijakan mungkin tidak memadai, terutama di mana anggota WTO mendukung gagasan neoliberal. dan karenanya mudah dibujuk oleh wacana WTO. Untuk mengatasi tekanan diskursif di WTO secara efektif, kemungkinan akan diperlukan untuk mengembangkan wacana tandingan yang kuat yang melibatkan dan secara efektif menentang bingkai, wacana, dan ideologi yang kuat yang digunakan di Komite TBT – dan kepentingan yang mereka wakili. . Strategi yang mungkin efektif dalam hal ini termasuk penyesuaian proposal pelabelan nutrisi dengan retorika neoliberal, misalnya dengan mengutip biaya ekonomi dan inefisiensi dari penundaan regulasi

DAFTAR PUSTAKA

- Afshin, Ashkan, et al., 2019. Efek kesehatan dari risiko diet di 195 negara: analisis sistematis untuk studi beban penyakit global 2017. *Lancet* 393 (10184), 1958–1972.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Allen, Luke N., 2020. Penentu komersial kesehatan global. *Buku Pegangan Global Kesehatan* 1–37.
- Atkinson, Rob, 2000. “Narasi kebijakan: konstruksi masalah perkotaan dan kebijakan perkotaan dalam wacana resmi pemerintah Inggris 1968–1998. *Kritik. Soc. Pol.* 20 (2), 211–232.
- Avni, Shlomit, Filc, Dani, Davidovitch, Nadav, 2015. “Asosiasi medis Israel wacana tentang ketidakadilan kesehatan. *Soc. Sains. Kedokteran* 144, 119–126.
- Babb, Sarah L., Alexander, E Kentikelenis, 2017. Lembaga keuangan internasional sebagai agen neoliberalisme. Dalam: *Dalam Buku Pegangan SAGE tentang Neoliberalisme*. Publikasi SAGE , Thousand Oaks.
- Case: Coal Mining Industry). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 161-175.
- Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM

PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165

Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.

Hartana, H. (2020). IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study

Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.

Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBatasan EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN Membaca. *Soc. Hukum Keadilan* 2 (2), 188–214.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Nike, 2012. Memahami promosi kesehatan dalam iklim neoliberal dan pembuatannya warga negara yang sadar kesehatan. *Kritik. Pub. Kesehatan* 22 (1), 99–105.

Nurhayati, B. R. (2017). Constitutional Basis for the Civil Rights of Illegitimate Children. *Pattimura Law Journal*, 1(2), 118-130.

Nurhayati, B. R. (2017). Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 92-100.

Nurhayati, B. R., & Purwanto, I. H. (2021). Juridical Study in The Application of the Law About Foster-Child Adoption in Indonesia by Foreign Nationals. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(1), 51-55.

PBB, 2018. Deklarasi Politik Pertemuan Tingkat Tinggi Ketiga Majelis Umum tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. A/73/L.2. Jenewa, Swiss: Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Stone, Deborah A., 1989. Cerita kausal dan pembentukan agenda kebijakan. *Polit. Sains*. P.104 (2), 281–300.

Sweet, Elizabeth, 2018. “Seperti kamu gagal dalam hidup”: utang, kesehatan, dan subjektivitas neoliberal. *Soc. Tahu Kedokteran* 212, 86–93.

Swinburn, Boyd, et al., 2011. Pandemi obesitas global: dibentuk oleh penggerak global dan lingkungan setempat. *Lancet* 378 (9793), 804–814.

TERBATAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243

Thomson, Michael, Alexander, Kentikelenis, Stubbs, Thomas, 2017. Struktural program penyesuaian berdampak buruk pada populasi yang rentan: tinjauan naratif sistematis tentang pengaruhnya terhadap kesehatan anak dan ibu. *Pub. Kesehatan Rev.* 38, 13.

Thorsen, Dag Einar, 2010. Tantangan neoliberal. Apa itu neoliberalisme? Penghinaan.

Thow, Anne-Marie, et al., 2017. Pelabelan nutrisi adalah masalah kebijakan perdagangan: pelajaran dari analisis masalah perdagangan tertentu di organisasi perdagangan dunia. *Promosi Kesehatan . Int.* 33 (4), 561–571.

Townsend, Belinda, 2020. Bagaimana kerangka kebijakan memungkinkan atau membatasi inklusi determinan sosial kesehatan dan ekuitas kesehatan dalam agenda kebijakan perdagangan? *Kritik. Pub. Kesehatan* 30 (1), 115–126.

Townsend, Belinda, et al., 2019. Bagaimana penegasan aktor dengan kekuatan asimetris

- otoritas dalam penetapan agenda kebijakan? Kajian klaim otoritas oleh aktor kesehatan dalam kebijakan perdagangan. Soc. Sains. Kedokteran 236, 112430.
- Verduin, Patricia, Agarwal, Sanjiv, Waltman, Susan, 2005. Solusi untuk obesitas: perspektif dari industri makanan. *Soc. J.Clin. Nutr.* 82 (1), 259S–261S.
- WHO, 2013. Rencana Aksi Global Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2013-2020. Organisasi Kesehatan Dunia, ” Jenewa, Swiss. Diakses tanggal 1 September 2018. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf.
- Wijayanti, L. A. (2022). 4.3 Tujuan metode Penelitian. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 36.